ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA MENANYAKAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Armoudyas Pratiwi NIM. C91215106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armoudyas Pratiwi

NIM : C91215106

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/

Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan

Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan

Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir

Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

4 4 5

Armoud/as Pratiwi NIM/C91215106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya" yang ditulis oleh Armoudyas Pratiwi NIM. C91215106 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Oktober 2019

Pembimbing,

Zakiyatul Ulya, M.HI NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Armoudyas Pratiwi NIM. C91215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Zakiyat/úl Ulya, M.HI. NIP. 199007122015032008

Penguji III,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh SH. M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji II,

<u>Dr. H Abd. Basith Jnaidy, M.Ag</u> NIP. 197110212001121002

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 21 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan.

tas Islam Negeri Sunan Ampel

r. H. Masruhan, M.Ag. 195904041988031003

iv



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Armoudyas Pratiwi
NIM	: C91215106
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: armoudyaspratiwi@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
ANALISIS HU	KUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA
MENANYAK	AN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN
	SEMAMPIR KOTA SURABAYA
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 21 Oktober 2019 Penulis

(Armoudyas Pratiwi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Suarabaya" adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan bagaimana analisi hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi,dokumentasi dan wawancara kepada beberapa Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah dan Mempelai Pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Semampir serta orang tua mempelai. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir sama dengan KUA lain yang mana calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat untuk nikah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebelum akad nikah berlangsung Pegawai Pencatat Nikah tidak menanyakan persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah karena beberapa alasan yakni: latar belakang keluarga di Kecamatan Semampir, telah ada lembar N3 (persetujuan calon mempelai), meminimalisir waktu mengingat banyaknya peristiwa nikah yang terjadi di KUA tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi, terlebih ada lembar N3 sebagai bentuk persetujuan calon mempelai. Akan tetapi, dilihat dari tata cara pelaksanaannya, KUA tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal karena tidak menerapkan pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yakni menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka: pertama, Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir hendaknya tetap menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum akad nikah dilangsungkan, mengingat tingginya tingkat perjodohan di Kecamatan Semampir sehingga dirasa dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan secara paksa; kedua, Pihak KUA Kecamatan Semampir hendaknya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan yang melarang adanya pernikahan secara paksa dan dampak memaksa anak untuk menikah.

DAFTAR ISI

		Halama	an
SAMPUL	DAL	_AM	. i
PERNYAT	AA	N KEASLIAN	. ii
PERSETU	JUA	N PEMBIMBING	. iii
PENGESA	HAl	N	. iv
KATA PE	NGA	ANTAR	. vii
DAFTAR	ISI		.ix
DAFTAR '	ТАВ	BEL	. xi
DAFTAR '		NSLITERAS <mark>I</mark>	
BAB I	PEN	NDAHULUA <mark>N</mark>	. 1
	A.	Latar Belakang Masalah	. 1
	B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C.	Rumusan Masalah	. 10
	D.	Kajian Pustaka	
	E.	Tujuan Penelitian	. 15
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	. 15
	G.	Definisi Operasional	. 16
	H.	Metode Penelitian	. 17
	I.	Sistematika Pembahasan	. 22
BAB II		NSEP PERNIKAHAN DAN PERSETUJUAN CALON MPELAI DALAM HUKUM ISLAM	
	A.	Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam	. 26
		1. Definisi Pernikahan	. 26
		2. Rukun dan Syarat Nikah	. 31
	B.	Persetujuan Calon Mempelai dalam Hukum Islam	. 40
		1. Persetujuan Calon Mempelai Menurut Para Ulama	. 40

		Persetujuan Calon Mempelai Menurut Kompilasi Hukum Islam	
BAB III	PE	LAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA MENANYAKAN RETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN MAMPIR KOTA SURABAYA	52
	A.	Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir	52
		Letak Geografis Kantor Urusan Agama	52
		2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir	53
	В.	Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya	57
		1. Tradisi Perjodohan di Kecamatan Semampir	57
	4	2. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Semampir	64
BAB IV	AK CA SE	JALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LAD NIKAH TANPA MENANYAKAN PERSETUJUAN LON MEMEPELAI DI KUA KECAMATAN MAMPIR DTA SURABAYA	70
		Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA	
		Kecamatan Semampir Kota Surabaya	70
	В.	Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA	
		Kecamatan Semampir Kota Surabaya	
BAB V		NUTUP	
	A.	Kesimpulan	
	В.	Saran	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRA	١N.		91

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1	Data Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya	55
3.2	Data Usia Terjadinya Nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota	
	Surabaya	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persetujuan berasal dari kata setuju yang berarti sepakat atau sependapat tanpa ada pertentangan maupun perselisihan dari pihak manapun.
Persetujuan calon mempelai merupakan suatu bentuk kerelaan hati dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan terkait terjadinya peristiwa pernikahan atas diri mereka dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan². Dalam hal ini berarti baik suami maupun istri sama-sama suka dan rela ntuk memasuki gerbang pernikahan, serta senang hati dalam membagi tugas, hak dan kewajibannya sehingga tujuan nikah dapat dicapai.
Bentuk persetujuan keduanya ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang bisa dipahami sehingga pernikahan yang dilakukan jelas tidak didasarkan atas paksaan orang lain.
Adapun mengenai persetujuan mempelai terutama pada mempelai perempuan dalam hukum Islam dipaparkan dalam ayat Alquran yakni Q.S al-Baqarah ayat 232, yakni sebagai berikut:

**Sepakatan atau sepakat a

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءِ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

¹ Tim Penyusun, Kamus Umum, cet. 1 (Bandung: Angkasa, 1996), 360.

² Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam

³ Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014), 36.

⁴ Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam

⁵ Depag RI, Al-Quran Terjemah Indonesia..., 29.

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Ayat tersebut di atas jelas memaparkan bahwa wali tidak diperkenankan menghalangi atau melarang anak-anak mereka untuk menikah ketika terdapat keinginan dan kerelaan diantara dua mempelai untuk menikah, namun ayat ini hanya terbatas pada janda saja, sedang untuk persetujuan seorang gadis dijelaskan dalam hadis Rasulallah saw. sebagai berikut:

"Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?' Beliau benjawab, "Bila ia diam."

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang gadis harus dimintai pendapat atau izin darinya dan dalam hal ini diamnya seorang gadis dapat dikategorikan sebagai bentuk persetujuannya. Mengenai persetujuan gadis di kalangan para Ulama masih menuai beberapa perbedaan pendapat hal ini dikarenakan adanya hak ijbar bagi wali. Wali dalam kuasanya memiliki hak ijbar yakni hak wali untuk menikahkan anak perempuannya yang biasa disebut *wali mujbir*. Islam mengakui adanya hak ijbar pada wali tersebut dan *wali mujbir* memiliki kewenangan untuk memaksa (ijbar) anak

,

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Tim Penerjemah Aqwam (Jakarta: Ummul Qura, 2012), 661.

perempuannya yang dianggap belum dewasa selagi masih sesama muslim, ia tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang yang ada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan pernikahan.⁷

Wali mujbir dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah perjodohan, pada kasus perjodohan biasanya orang tualah yang mencari atau berperan penting dalam memilih pasangan bagi anaknya, pilihan orang tua dianggap merupakan pilihan terbaik sehingga terkadang mengesampingkan pendapat, perasaan dan persetujuan sang anak.

Pada zaman yang modern ini adanya *wali mujbir* atau perjodohan mungkin sudah tidak semarak dahulu, namun tidak menampik kemungkinan bahwa masih ada beberapa orang yang menikah karena adanya perjodohan. Seperti apa yang ada di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, meskipun Surabaya merupakan kota besar namun beberapa masyarakatnya ada yang masih menggunakan hak ijbar wali atau perjodohan menjadi salah satu jalan terbaik untuk mendapatkan pasangan bagi anak mereka. Bagi masyarakat di Kecamatan Semampir yang mayoritas merupakan suku Madura hal ini dianggap lumrah, bahkan mereka menjadikan perjodohan ini sebagai tradisi turun-temurun dan tradisi tersebut dikenal dengan istilah *abhekalan* yang merupakan proses mengikat dua orang anak berlawanan jenis (laki-laki dengan perempuan) dalam sebuah ikatan yang mirip dengan pertunangan.

.

⁷ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 100.

⁸ Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2019.

⁹ Dardiri Zuhairi, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press, 2013) 78.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Semampir alasan orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anak mereka karena mereka menganggap anak-anak mereka masih belum mampu untuk menentukan pilihan dengan benar dan lebih mudah terbawa perasaan sesaat serta ada beberapa dari mereka yang khawatir anak-anak mereka akan larut dalam pergaulan bebas. Hal ini juga dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Semampir merupakan suku Madura yang dikenal masih memegang erat adat serta tradisi mereka dan beberapa diantara mereka masih menjadikan perjodohan sebagai sebuah tradisi, bahkan beberapa orang tua menikahkan anak mereka dengan kerabat jauh mereka, hal ini diperuntukan agar tali persaudaraan yang terjalin tidak terputus dan mempermudah keluarga untuk memantau anaknya karena pihak keluarga sebelumnya sudah saling mengenal.¹⁰

Adapun dalam perjodohan yang terjadi sang anak acap kali merasa tidak yakin dan ada rasa terpaksa dalam melangsungkan pernikahan terlebih bila orang tua pada saat menjodohkan tidak menanyakan perasaan atau berunding terlebih dahulu dengan sang anak, meski pasangan yang akan mereka nikahi telah dianggap baik oleh orang tuanya. Namun, tidak semua hal yang baik menurut orang tua itu baik bagi anak tersebut, apalagi dalam hal perkawinan. Seperti yang diketahui perkawinan ini bukanlah hal yang sepele, dalam menjalani bahtera rumah tangga banyak hal yang akan dilalui dan bila pada awal perkawinan keduanya tidak saling mencintai dan tidak merasa saling

•

¹⁰ Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2019.

cocok satu sama lain, hal ini akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, persetujuan mempelai ini merupakan hal yang harus ada sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Adapun dalam pernikahan, persetujuan merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hubungan ke depan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan bila tidak didasarkan persetujuan terlebih dahulu atau tidak berasaskan kerelaan akan lebih mudah permasalahan-permasalahan dan menimbulkan percekcokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sesuai dengan tujuan diadakannya pernikahan. Pernikahan sendiri adalah suatu ikatan suci diantara seorang laki-laki dan perempuan yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan yang baik untuk makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. ¹¹ Menikah sendiri merupakan perintah dari Allah Swt. bagi umat manusia yang telah dipaparkan dalam firman-Nya Q.S an-Nissa ayat (1) yakni sebagai berikut:¹²

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

¹² Depag RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001), 61.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

lain , dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Pengertian nikah juga dipaparkan dalam hukum positif indonesia, bahkan pernikahan memiliki Undang-Undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan (dengan seterusnya disebut UUP), mengingat betapa pentingnya pernikahan bagi umat manusia. Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perihal pernikahan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (seterusnya disebut KHI) berdasarkan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 2 KHI diatur bahwa pengertian pernikahan yakni akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat nikah adalah perjanjian antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu ikatan dan membolehkan keduanya untuk memiliki satu sama lain baik secara jasmani maupun rohani. Menikah hukumnya wajib bagi setiap umat yang dirasa telah mampu untuk membiayai diri dan merasa khawatir akan terjermus dalam perbuatan yang diharamkan.¹³

Menikah sendiri merupakan suatu bentuk perintah bagi Allah yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan

-

¹³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, terj. Musthofa Aini et al. (Jakarta: Darul Haq, 2009), 748.

rahmah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:¹⁴

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Pernikahan selain bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, menikah juga bertujuan untuk menyalurkan naluri seks manusia agar sesuai dengan syariat untuk menjaga diri, pandangan dan kemaluan dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ada dalam hadis Rasulullah Saw. yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata, "Ketika kami masih bujang dan belum memiliki apa-apa, Rasulullah Saw bersabda kepada kami":

"Wahai segenap pemuda, barang siapa diantara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya menikah itu dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mamp menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menjadi obat baginya (dalam mengendalikan nafsunya)" (Muttafaq 'alaih).

•

¹⁴ Depag RI, Al-Quran Terjemah Indonesia..., 575.

¹⁵ Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 24.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 423.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia sehingga baik dalam hukum Islam, maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur baik rukun maupun syarat pernikahan seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul, serta persyaratan lainnya, yakni salah satunya adalah persetujuan dari calon mempelai. Terkait persetujuan ini bahkan diatur dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bahkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terkait persetujuan kedua calon mempelai di hadapan saksi nikah dan apabila pernikahan tidak disetujui oleh salah satu atau kedua calon mempelai maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Peraturan tersebut merupakan bentuk ralisasi terhadap hadis yang telah penulis paparkan terkait seorang anak yang harus dimintai persetujuannya.

Akan tetapi dalam prateknya penulis menemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah seperti apa yang ada dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini dirasa sangat berpengaruh bagi masa depan kedua calon mempelai juga untuk menghindari adanya praktik kawin paksa di masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya, mengingat perjodohan di sana masih kerap dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terkait hal ini, terutama terhadap persetujuan dalam perjodohan di Kecamatan Semampir dan mengenai tidak ditanyakannya kembali persetujuan serta keyakinan calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan ini oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Semampir yang bertugas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1. Teori terkait persetujuan mempelai dalam hukum Islam.
- Praktik perjodohan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- 3. Pentingnya persetujuan calon mempelai dalam pernikahan.
- Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

 Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Adapun berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah agar pembahasan tidak melebar kemana-mana dalam peneletian ini penulis membatasi pokok permasalahan yang akan penulis teliti yakni sebagai berikut:

- Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan ringkasan atau gambaran tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait pembahasan masalah yang akan diteliti, sehingga tidak ada pengulangan, kesamaan ataupun duplikasi dari penelitian yang telah ada. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

.. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Galang Perwira tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita dalam Perkawinan". Skripsi ini membahas tentang pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai sosok pemikir yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam mengenai persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan dan apakah keharusan mendapat izin dari calon mempelai wanita telah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam hal adanya hak ijbar wali untuk menikahkan anak perempuannya.

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah dalam hal persetujuan calon mempelai dalam perkawinan. Letak perbedaan skripsi di atas dan penelitian penulis adalah skripsi di atas membahas mengenai persetujuan mempelai wanita menurut pandangan atau pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai tugas pegawai pencatat pernikahan dalam menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah dan ketentuan

¹⁷ Muhammad Galang Perwira, "Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Persetujuan Calon mempelai wanita dalam Perkawinan" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).

_

yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa disertai kerelaan kedua belah pihak.

2. Skripsi yang disusun oleh Ade Rahma tahun 2015, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh yang berjudul "Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)". ¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap hak ijbar yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempannya dan dikaitkan dengan teori gender dimana hak ijbar wali disini dianggap menghilangkan hakhak yang ada pada perempuan yang pada dasarnya setara dengan laki-laki.

Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitian di atas adalah keduanya membahas mengenai hak ijbar wali untuk menikahkan anak perempuannya (*wali mujbir*) dan perlunya persetujuan mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah pada arah pembahasan dimana penelitian penulis lebih kepada hukum Islam terhadap pentingnya persetujuan calon mempelai dalam pernikahan yang dilakukan melalui *wali mujbir*, sedangkan skripsi diatas lebih kepada permasalahan gender dan persamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam menentukan pasangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sry Irnawati tahun 2015, mahasiswa UIN Alaudin, Makasar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di Kelurahan Bontaramba Kecamatan

٠

¹⁸ Ade Rahma, "Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 2015).

Sumba Opu Kabupaten Gowa". 19 Skripsi ini membahas mengenai fakta nikah paksa yang ada di kabupaten Gowa dan bagaimana pandangan hukum Islam serta tokoh masyarakat yang ada di lokasi penelitian terkait adanya nikah paksa tanpa adanya persetjuan mempelai terlebih dahulu serta bagaimana cara menyelesaikan fenomena nikah paksa yang terjadi.

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yakni terkait pembahasan pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua mempelai tanpa adanya persetujan calon mempelai. Adapun letak perbedaan skripsi ini dan penelitian penulis yakni pada titik bahasan yang mana skripsi diatas lebih mengarah kepada fakta yang ada di suatu daerah dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penulis lebih kepada pentingnya persetujuan calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum berlangsungnya pernikahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ari Irawan tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga yang berjudul "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i dan Hanafi". Skripsi ini membahas mengenai status *wali mujbir* atau hak ijbar wali di dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi yang mana pada dua aliran

.

¹⁹ Sry Irnawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di Kelurahan Bontaramba Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa" (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2015).

Muhammad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i dan Hanafi" (Skripsi--Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

madzhab tersebt terdapat perbedaan pendapat dan juga penelitian ini juga membahas mengenai hak ijbar wali dalam Hak Asasi Perempuan.

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian di atas yakni terkait pembahasan wali mujbir atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan persetujuan anak yang akan dinikahkan. Adapun letak perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis yakni pada skripsi tersebut hanya membahas mengenai wali mujbir dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan penulis membahas persetujuan calon mempelai menurut jumhur Ulama dan KHI serta lebih mengarah kepada pelaksanaan yang ada dalam menikahkan calon mempelai berlangsung atas dasar kerelaan atau tidak.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Rindiana Dewi tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Prespektif Hadis". Skripsi ini membahas mengenai hadis izin mempelai perempuan yang mana dalam satu hadis menyatakan izin mempelai perempuan itu diperlukan dan hadis lainnya menyatakan bahwa tidak harus ada izin dari mempelai perempuan dalam menikahkannya.

Letak persamaan penelitian penulis dan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas mengenai persetujuan mempelai dalam suatu pernikahan terutama pada mempelai perempuan yang selama ini masih diperdebatkan perihal persetujuannya. Adapun letak perbedaannya skripsi

_

²¹ Ririn Rindiana Dewi, "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Prespektif Hadis" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

diatas membahas mengenai perlunya izin mempelai dalam prespektif suatu hadis, sedangkan penelitian penulis juga memaparkan persetujuan mempelai menurut Kompilasi Hukum Islam dan lebih mengarah kepada praktik ditanyakannya persetujuan mempelai baik perempuan maupun laki-laki berdasarkan pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yang ditanyakan di hadapan dua orang saksi nikah saat sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan.

Berdasarkan lima penelitian di atas, jelas bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya" belum pernah dibahas dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian penulis lebih mengkaji terhadap analisis hukum Islam tentang pelaksanaan akad nikah yang tidak menanyakannya persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan yakni sebagai berikut:

 Mengetahui pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan kembali tentang persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Segi Teoritis: Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat keilmuan bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengkaji dan mengembangkan wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan persetujuan calon mempelai dan pelaksanaan ditanyakannya persetujuan calon mempelai oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan dua saksi nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- 2. Segi Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan acuan hukum bagi masyarakat luas mengenai persetujuan calon mempelai dan tinjauan hukum Islam terhadap tidak ditanyakannya persetujuan calon mempelai oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan dua saksi nikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi merupakan pengertian mengenai suatu istilah dari konsepkonsep yang dipakai dalam penelitian.²² Hal ini dilakukan untuk memberikan

²² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 134.

gambaran perbedaan presepsi yang ada dalam penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian lain yang memiliki permasalahan sama.²³ Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas maka penulis memberikan beberapa penjelasan terkait judul yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut:

- 1. Analisis Hukum Islam: Menganalisis suatu permasalahan dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan disini adalah teori pernikahan dan persetujuan mempelai dalam Islam, baik berdasarkan Alquran, hadis dan pendapat para Ulama serta Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon memepelai.
- 2. Pelaksanaan akad nikah: Suatu tindakan atau praktik berlangsungnya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang meliputi ijab dan kabul antara mempelai dengan wali atau wakilnya dan dihadiri oleh kedua calon mempelai serta saksi nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir, baik yang terjadi di dalam KUA ataupun di luar KUA tersebut.
- 3. Persetujuan calon mempelai: Persetujan calon mempelai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persetujuan atau kesepakatan calon mempelai terkait diadakannya pernikahan antara kedua pihak sebelum akad nikah. Bentuk persetujuan keduanya ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang bisa dipahami sehingga pernikahan yang dilakukan tidak didasarkan atas paksaan orang lain, yang ditanyakan oleh Pegawai

²³ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 37.

Pencatat Nikah di hadapan dua saksi nikah sebelum berlangsungnya akad nikah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah²⁴ dan bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis aktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang dikaji. 25 Agar penelitian dapat tersusun secara sistematis penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field rescarsh) yang meneliti tentang pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas data yang dikumpulkan penulis yakni dokumen profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya serta data terkait pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang ada di KUA tersebut.

²⁴ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber primer

Data yang didapat secara langsung dari sumbernya, jadi sumber data tersebut langsung memberikan data pada pengumpul data.²⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan dari kepala KUA, penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semampir terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai, serta orang tua mempelai dan pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Semampir karena adanya paksaan atau dijodohkan oleh orang tuanya.

Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data yang digunakan sebagai pendukung data primer.²⁷ Sumber data sekunder ini bisa berupa referensi atau literatur dari buku maupun penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun sumber sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.
²⁷ Ibid., 225.

- 2) Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia, Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.
- 3) Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I.
- 4) Buku-buku mengenai Fiqih Munakahat.
- Dokumen terkait profil KUA dan peristiwa nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik nyata yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel.²⁸ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data, dengan cara tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang dimintai wawancara (narasumber).²⁹ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, penghulu atau Pegawai

.

²⁸ Ibid 137

²⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 72.

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semampir, orang tua beserta calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar dan merasakan secara langsung). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan fakta di lapangan terkait pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang guna melengkapi wawancara dalam penelitian. Dalam penelitian ini data dokmen yang digunakan meliputi dokumen-dokumen, arsip data catatan atau pengambilan sumber data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri dapat diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik

_

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 114.

³¹ Ibid., 240.

analisis deskriptif, dimana teknik analisis deskriptif ini merupakan penggambaran secara sistematis berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian dengan pola pikir induktif dimana penulis akan menganalisis fakta (khusus) yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir terkait praktik pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai dengan menggunakan teori (umum) terkait pernikahan dan persetujuan calon mempelai dalam hukum Islam, baik Alquran, hadis, pendapat para Ulama maupun KHI.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ditujukan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan penulis membagi lima bab dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan konsep pernikahan dan persetujuan calon mempelai dalam pernikahan. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori terkait pernikahan dan persetujuan calon mempelai menurut hukum Islam, sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis juga membahas mengenai

•

³² Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah...*, 60.

definisi pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, kemudian pembahasan mengenai persetujuan calon mempelai dalam hukum Islam, serta persetujuan calon mempelai dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan praktik atau pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, meliputi demografi KUA Kecamatan Semampir, permasalahan terkait tradisi perjodohan yang ada di Kecamatan Semampir serta pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dalam bab ini berisi analisis penulis terkait pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang ada di KUA Kecamatan Semampir dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di KUA Kecamatan Semampir.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran menyangkut permasalahan juga penelitian yang telah dikaji oleh penulis.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang diambil dari bahasa arab nakaḥa dan zawwaja yang berarti penyatuan dan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu terdapat juga yang mengartikan dengan makna percampuran¹. Adapun secara etimologi nikah berarti damma yang secara harfiyah artinya menindih, menyatukan, menggabungkan menghimpit, menggauli², atau wat'i yang artinya bersetubuh, bersenggama atau akad yang berarti perjanjian.³

Adapun para ahli fikih empat mazhab berbeda-beda dalam memberikan definisi nikah itu sendiri. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah merupakan akad yang dapat memberikan manfaat untuk dibolehkannya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Shafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wat'i (bersenggama). Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersenggama, bersenang senang dan

¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jāmi' Fī Fiqhi an-Nisa'*, terj. Ahmad Zainal Dachlan (Depok: Fathan Media, 2017), 323.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

³ Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014), 3.

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya. Adapun golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.⁴

Selain pendapat ulama di atas, al-Malibar mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan kata nikah. Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pengertian nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolongmenolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang semula dilarang oleh syariat, padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruh. Hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya para ulama dalam memberikan definisi tidak berbeda jauh dengan makna aslinya juga dapat dibenarkan bahwa salah satu alasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah hubungan adalah dorongan yang bersifat biologis baik karena ingin mendapatkan keturunan ataupun untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

,

⁴ Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan: Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Kawin Casablanca* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 10.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

⁶ Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan: Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Kawin Casablanca...*, 11.

Pengertian pernikahan juga dipaparkan dalam pasal 2 KHI yakni merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah⁷.

Idris Ramulyo mendefinisikan mengenai perkawinan atau pernikahan bila dilihat dalam tiga segi, yakni sebagai berikut:⁸

a. Pernikahan dilihat dari segi hukum

Adapun bila diliat dari segi hukum pernikahan merupakan sebuah perjanjian, dimana telah dipaparkan pada Q.S an-Nisa':21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا عَلِيظًا "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian (ikatan Pernikahan) yang kuat."(QS.4:21)

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, hal ini dapat dibenarkan karena agar pernikahan bisa dikatakan sah ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Pada cara memutus atau mengakhiri suatu ikatan perkawinan tidak semata-mata bisa langsung mengakhiri begitu saja, karena telah diatur sebelumnya yakni dengan prosedur talak, kemungkinan shiqaq, fasakh dan lain sebagainya, yang mana dalam tiap-tiap prosedur tersebut memiliki ketentuan dan akibat hukumnya masing-masing.

.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.

⁸ Mohd Idris Ramlyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 17.

b. Pernikahan dari segi sosial

Dalam masyarakat di setiap negara terdapat suatu penilaian yang umum bahwa orang yang telah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai karena dirasa telah mempu menerima tanggung jawab yang besar dan dinilai lebih dewasa dari orang-orang yang belm menikah.

c. Pernikahan dari segi agama

Adapun menurut pandangan agama pernikahan dianggap sebagai sebuah lembaga yang suci dan merupakan salah satu jalan untuk menyempurnakan separuh agama serta guna melanjutkan keturunan umat tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah yakni Q.S an-Nisa' ayat 1 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(QS.4:1)

.

⁹ Depag RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia..., 65.

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita, yang memiliki segi-segi perdata. Maka berlaku juga beberapa asas diantaranya, sebagai berikut:¹⁰

- a. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam pernikahan, kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai saja tapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak, karena dalam pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan saja tapi juga keluarga kedua belah pihak.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama di atas, dalam hal ini jelas bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara terpaksa dan harus berdasakan persetujuan calon mempelai.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan hak yang dimiliki oleh siapapun, dimana pernikahan harus didasarkan kesukarelaan antara kedua calon mempelai, maka dalam hal ini baik calon suami maupn calon istri bebas memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi suami ataupun istrinya dan bebas menolah bila antara suami dan istri tidak ada kecocokan.
- d. Asas kemitraan suami istri bersangkutan dengan hak dan kewajiban suami istri yang mana mereka telah berikrar ntuk menjalin ikatan dan hidup bersama selamanya. Adapun baik suami maupun sitri memeiliki fungsi dan tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat,

•

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 127.

namun kemitraan ini juga menyebabkan kedudukan antara suami dan istri setara dalam beberapa hal tertentu.

- e. Asas untuk selama-lamanya menunjukan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang untk seumur hidup.
- f. Asas monogami terbuka, bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu orang asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat untk mampu berlak adil terhadap semua wanita yang dinikahinya.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan merupakan perbuatan yang memiliki akibat hukum, maka dari itu segala hal yang berkaitan dengan pernikahan diatur oleh agama maupun negara. Adapun dalam melaksanakan pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:¹¹

- a. Mempelai laki-laki atau calon suami;
- b. Mempelai wanita atau calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

Calon suami dan calon istri

Adapun bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, para Ulama Mazhab sepakat bahwa keduanya haruslah berakal dan balig. Kedua calon mempelai tidak sedang ihram, haji ataupuun umroh juga diantara kedua mempelai tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, selain itu pernikahan kedua calon mempelai harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun. 12

Adapun KHI dalam hal persyaratan tersebut tidak jauh berbeda dengan hukum Islam pada umumnya, hanya saja KHI mengatur mengenai usia kedua calon mempelai, untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, apabila usia mempelai kurang dari persyaratan tersebut keduanya bisa mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan. Bagi mempelai yang usianya di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka.¹³

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan suatu kekuasaan atau wewenang atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang lain (sempurna),

-

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Khamsah*, terj. Afif Muhammad, cet. 1 (Jakarta: Basrie Press, 1994), 20.

¹³ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

karena kekurangan tertentu yang dimiliki orang yang dikasai tersebut demi kemaslahatannya sedniri. Adapun menurut Ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali bahwa wanita yang balig dan berakal sehat yang masih gadis hak mengawinkannya ada pada wali mereka. Akan tetapi, apabila ia telah janda maka hak tersebut jatuh kepada dirinya sendiri dan wali tidak berhak mengawinkan wanita janda tersebut tanpa persetujuannya ataupun menghalangi wanita janda tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Menurut Ulama Hanafi, wali bukan merupakan syarat pernikahan, menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. 15

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dan tidak membenarkan pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa dihadiri wali dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali itu batal atau tidak sah. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulallah Saw. bahwa "tidak ada

¹⁴ Ibid., 53

¹⁵ Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 60.

pernikahan melainkan dengan adanya wali". ¹⁶ Maka dapat diketahui bahwa wali memiliki peran penting dalam jalannya suatu pernikahan, seorang yang mnjadi wali haruslah laki-laki, berakal, balig, muslim, tidak dalam keadaan ihram dan adil. Adapun bagi perempuan yang tidak memiliki wali, maka hakimlah yang berhak menikahkan perempuan tersebut¹⁷. Adapun wali sendiri tergolong dalam dua bagian, yakni wali nasab dan wali hakim, dalam pasal 21 KHI mengelompokan wali nasab dalam empat kelompok sesuai urutan kedudukannya dalam susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yakni sebagai berikut:

- a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
- b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seyah dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal (enggan). Dalam

¹⁶ Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 111.

¹⁷ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Kitbah dan Nikah*, cet. 1 (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 87.

hal ini apabila wali '*aḍal* atau enggan untuk menikahkan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Dua orang saksi

Kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan juga merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, Ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi tidaklah sah¹⁸. Adapun saksi dalam pernikahan haruslah dua orang laki-laki, namun dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan diperbolehkan.¹⁹ Selain itu, saksi juga harus berakal, balig, muslim, adil dan memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul, hal ini dikarenakan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan dua belah pihak saja tapi juga menyangkut hak anak buah dari pernikahan tersebut, maka dari itu adanya saksi memiliki peranan penting dalam sebuah pernikahan karena terkadang seorang bapak enggan mengakui anaknya sehingga hal ini dapat menghilangkan nasab anak tersebut.²⁰

d. Akad nikah (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul merupakan bentuk dari perjanjian atau akad dalam pernikahan, karena merupakan suatu akad maka adanya ijab

²⁰ Muhammad Ra'fat Utsman, Fiqih Kitbah dan Nikah, cet. 1..., 110.

•

¹⁸ Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam..., 114.*

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 65.

kabul ini sangat penting dan harus ada dalam melangsngkan pernikahan. Dalam hal ini orang yang berakad adalah calon suami dengan wali calon istri dan ijab kabul merupakan sighat dari akad pernikahan tersebut, dalam pengucapan ijab dan kabul haruslah benar-benar menunjukan suatu keridhaan atas kedua belah pihak dan secara konkrit dinyatakan secara tegas pada saat pernikhan itu dilangsungkan²¹. Ijab kabul sendiri dapat dilakukan dengan bahasa apapun asalkan pada pelafalannya dapat menunjukan kehendak pernikahan pihak yang bersangkutan dan dapat dimengerti juga dipahami oleh para pihak serta para saksi.²² Pernikahan orang yang tidak mempu melafalkan ijab kabul dengan cara lisan dapat melakukanya dengan bahasa isyarat, jika isyarat tersebut dapat dipahami oleh para pihak yang bersangkutan. Seperti halnya jual-beli yang dilakukan orang bisu dengan isyaratnya dikatakan sah, karena isyaratnya menunjukan sebuah pemahaman yang dapat dimengerti.²³

Adapun selain rukun dan syarat yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa syarat dalam pernikahan yakni sebagai berikut:²⁴

a. Tidak melanggar larangan pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral maka dalam melangsungkan nikah hruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib (Bandung: PT. Al Maarif, 1997), 55.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 26.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah*, terj. Amira Zrein Matraji, vol. 2 (Beirut:Dar al-Fikr, 1996), 396.

²⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 25.

- b. Kedewasaan untuk menikah, seperti yang diketahui pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menyangkut hak orang lain maka dari itu kedewasaan calon mempelai diperlukan. Kedewasaan yang dimaksud di sini yakni keadaan seseorang yang dipandang telah cukup matang baik secara usia, fisik, psikis, mental dan financial.
- c. Persetujuan calon suami dan calon istri merupakan salah satu persyaratan pernikahan yang diatur oleh agama maupun perundang-undangan, karena menyangkut hak seseorang maka persetujuan dalam perkawinan dirasa sangat penting. Pada hakikatnya calon suami dan istrilah yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu dituntut adanya kesiapan batin yang diekspresikan dengan kata setuju atau sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d. Izin wali, dalam pernikahan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Baik negara maupun agama sepakat bahwa keberadaan wali merupakan rukun nikah yang menentukan keabsahan pernikahan tersebut, maka dari itu izin wali sangat dibutuhkan dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-ndang Perkawinan) menjelaskan bahwa Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Alquran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Alquran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 31.

perkawinan itu. Namun hadis Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut.

B. Persetujuan Calon Mempelai dalam Hukum Islam

1. Persetujuan Calon Mempelai Menurut Para Ulama

Persetujuan berasal dari kata setuju yang berarti sepakat atau sependapat tanpa ada pertentangan maupun perselisihan dari pihak manapun. Adapun dalam pernikahan persetujuan calon mempelai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, persetujuan ini merupakan bentuk kerelaan dan rasa ikhlas kedua belah pihak atas terjadinya pristiwa pernikahan diantara keduanya. Persetujuan dalam perkawinan pada dasarnya tidak sama dengan persetujuan yang lainnya seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya. Perbedaan antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan-persetujuan lain yakni dalam persetujuan biasa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi baik ketentuan dalam persetujuan sesuai dengan kehendak mereka, asalkan persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan aturan atau Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami dan istri. 27

²⁶ Tim Penyusun, Kamus Umum, cet. 1 (Bandung: Angkasa, 1996), 360.

²⁷ Mohd Idris Ramlyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ...*, 17.

Seorang perempuan dan laki-laki yang menyatakan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan berarti mereka telah saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung juga mengenai kedudukannya sebagai orang tua bagi anakanak atau keturunannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat mereka masih terikat pernikahan saja, namun juga dalam menghentikan atau memutus ikatan pernikahan mereka yang dikenal dengan perceraian, baik suami maupun istri tidak bisa menentkan sendirri syarat-syarat perceraian tersebut, karena sudah ada peratran hukum yang mengaturnya dan mereka wajib untk mentaati peraturan tersebut.²⁸

Dalam Islam, laki-laki dan perempan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/istri yang disukai demi keharmonisan, kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Karena ketentraman jiwa merupakan hal utama yang menjadi dasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri guna membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan damai.²⁹ Adapun Alquran memang tidak menjelaskan bagaimana persetujuan calon mempelai dalam pernikahan, namun Rasulullah Saw. telah memberikan keterangan mengenai pentingnya kata setuju dari pihak yang akan melangsunkan pernikahan,

²⁸ Ibid., 18.

²⁹ Zaitun Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2015), 56.

bahwa perempuan yang masih belum menikah hars dimintai izinnya dan indikasi setujunya perempuan adalah diamnya.

Penjelasan tersebut menunjukan penghargaan Rasulullah terhadap pentingnya persetujuan calon sami dan istri, khususnya pada para perempan yang ada masa itu sulit untuk mengekspresikan kehendaknya.³⁰

Adapun terkait hal ini juga dipaparkan dalam hadis Rasulallah Saw, yakni sebagai berikut:³¹

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda, "seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk dan tanda izinnya adalah diamnya." (HR Imam Muslim)

Berdasarkan hadis di atas maka jelas bahwa persetujuan perempuan itu sangatlah penting, baik bagi janda maupun gadis. Bagi seorang janda telah jelas bahwa mereka berhak atas dirinya sendiri karena janda dirasa lebih matang mentalnya dan mampu bertanggung jawab atas diri mereka dibanding perempuan yang masih gadis.

Anak gadis bila dilihat dari segi usia maupun kondisi psikisnya dirasa lebih labil dan gegabah dalam melakukan sesuatu, mereka biasanya juga malu untuk menegaskan keinginan atau pendapatnya. Maka dari itu syara' mengaitkan sesuatu yang menunjukkan kerelaan seorang gadis yakni diamnya sebagai bentuk kerelaannya, untuk memberikan keringanan bagi mereka dalam menyampaikan pendapat atau persetujuan

³⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 28.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 431.

mereka. Para Ulama juga menjelaskan bahwa sorang wali harus mengetahui jika gadis diam tidak bicara itu tandanya setuju dan disunnahkan dalam meminta izin nikah kepada seorang perempuan hendaklah dengan cara mengutus seorang perempuan yang terpercaya guna melihat reaksi perempuan yang dimintai izin tersebut, diutamakan yang meminta izinnya itu mestinya ibunya, karena ia yang lebih mengetahui perempuan tersebut dari orang lain karena biasanya anak perempuan lebih dekat dan mau terbuka dengan ibunya daripada dengan yang lainnya.³²

Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa syara' mengurangi hak perempan yang masih gadis dalam berpendapat dan mencampuri secara langsung mengenai akad atau pernikahan atas dirinya, karena bagi anak gadis yang sudah dewasa dan menurut kebiasaanya mereka tidak dipengaruhi rasa malu ketika melaksanakan hak atas dirinya, maka kedudukan mereka sama dengan janda, yakni berhak secara penuh atas diri mereka.³³

Menurut pendapat jumhur Ulama dalam hal persetujuan ini sepakat bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya terlebih dahulu, sedang ia sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut maka pernikahan itu menjadi batal. Akan tetapi para Ulama

-

32 Muhammad Ra'fat Utsman, Fiqih Kitbah dan Nikah, cet. 1..., 103.

³³ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqh* terj. Ismuha (Jakarata: Bulan Bintang, 1993), 16.

Mazhab berbeda pendapat terkait persetujan seorang gadis yang akan dinikahkan oleh orang tua mereka.³⁴

Imam Syafi'i mengakui adanya hak ijbar bagi wali tapi dibatasi hanya pada ayah dan kakek saja, dimana wali yang memiliki hak ijbar atau biasa disebut *wali mujbir* merupakan orang yang berhak menikahkan anak perempuannya. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut tanpa izinnya terlebih dahulu apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh, selama pernikahan yang dilakukan tidak memiliki dampak kerugian bagi anak tersebut.³⁵

Adapun perkawinan bagi anak gadis yang sudah dewasa, hak ijbar ini diiringi anjuran bagi sang ayah untuk bermusyawarah dengan pihakpihak yang hendak melangsungkan pernikahan dalam rangka mendapatkan izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Menurut imam syafi'i, persetujuan anak yang masih gadis baik yang masih kecil maupun sudah dewasa yang menunjukan kerelaannya untuk dinikahkan oleh bapaknya yakni cukup dengan diamnya, sedangkan bagi seorang janda adalah dengan perkataannya yang diucapkan secara tegas³⁶. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:³⁷

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'*, cet. 1, terj. M Abdul Goffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 400.
 Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, cet. 1. (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 79.

Khon dadin Nasution, *Hukum Perkawhan*, eet. 1. (10gyakarta. Academa 1azzara, 2004), 79. ³⁶ M. Aenur Rasyid, "Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i Prespektif Gender" (Skripsi-

⁻Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Tim Penerjemah Aqwam (Jakarta: Ummul Ouran, 2012), 662.

حَدَثَنَا سَعِيدِ بن مَنْصُورُ وَقُتَيبَة بْن سَعِيد. قَالا: حَدَثَنَا مَالِك. وَحَدَثَنَا يَحْبِي بن يَحْي (واللفظ له) قَالَ: قَلَتْ لمَالِك حَدَثَكَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبِير، عَن اِبْنُ عَبَّاس، أَن النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْهُمَا صُمَاهُما ؟" قَالَ: نَعَم

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan lafadh ini miliknya, ia berkata: Aku berkata kepada Malik: Apakah 'Abdullah bin Al-Fadhl pernah berkata kepadamu, dari Naafi', dari Ibnu 'Abbas: Bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintau ijin/persetujuan darinya. Sedangkan ijinya adalah diamnya?". Ia (Malik) menjawab: "Ya"."

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya ijbar bagi wali karena adanya alasan atau dasar karena tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal dan belum mumayiz. Namun dalam hal ini Imam Hanafi juga memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis yang telah dewasa, menurut Imam Hanafi mereka (gadis) yang sudah balig dan berakal sehat disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut dan bahwa daripadanya harus dimintai persetujuannya.³⁸

Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat

_

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, terj. M.A Abdrrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: As-syifa, 1990), 357.

disamakan dengan perempuan janda.³⁹ Namun bagi janda yang belum dewasa Imam Hanafi berpendapat bahwa ia boleh dipaksa menikah oleh ayahnya.⁴⁰

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Adapun janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah dan bagi gadis atau janda yang belum dewasa atau belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak ijbar. Adapun wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak ijbar.

Mazhab Hanbali menyikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali⁴². Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁴³

Masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena menurut Imam Abu Hanifah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih

_

³⁹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 85.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, terj. M.A Abdrrahman dan A. Haris Abdullah..., 358.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasqi, *Raḥmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 341.
 Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, juz 9 (Jakarata: Pustaka

⁴² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, juz 9 (Jakarata: Pustaka Azzam,2012), 301.

⁴³ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan..., 85.

pasangan kelihatan lebih toleran terbukti bahwa menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta Qadhi untuk membatalkan perkawinan itu. 44 Perempuan yang berakal dan dewasa memang berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri,baik gadis maupun janda. Akan tetapi, yang lebih disukai adalah apabila mereka menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, kerena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila mereka melakukan sendiri akadnikahnya. 45

Menurut pendapat Syaikh Mahmud Syaltut mengenai persetujuan anak yang masih gadis, sifat perawan atau anak gadis yang cenderung dianggap labil dan malu-malu untuk mengemukakan sesuatu tidak mempunya pengaruh bagi perempuan tersebut untuk kehilangan haknya selama ia sudah dewasa dan berakal sehat. Maka dalam hal ini ia

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B et al. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 345.

¹⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Figh Munakahat...*, 60.

mendapat perlakuan dan hak yang sama sebagaimana seorang janda dalam urusan nikah⁴⁶.

Adapun Syaikh Sayyid Sabiq Ulama kontemporer Mesir dibidang fikih dan dakwah Islam berpendapat dalam kitabnya yang berjudul fiqih sunnah mengenai hal meminta izin kepada perempuan sebelum dinikahkan, pihak wali tetap harus memperhatikan pandangan perempuan yang hendak dinikahkan guna mengetahhui kerelaannya sebelum akad nikah. Oleh karena itu, syariat melarang memaksa perempuan yang masih perawan atau janda untuk dinikahkan tanpa restu dan kerelaannya. Syariat menilai bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa dimintai izin kepada yang bersangkutan maka akadnya dianggap tidak sah, karena perempuan yang dinikahkan secara paksa memiliki hak menuntut pembatalan pernikahan atas perlakuan walinya karena menikahkan secara paksa.⁴⁷

Maka kerelaan atau persetujuan dari calon mempelai dalam pernikahan itu harus ada, karena maksud disyariatkannya pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan diantara kedua pasangan supaya bisa melahirkan keturunan dan kemudian dididik oleh keduanya. Hal ini tidak mungkin tercapai jika salah seorang diantara pasangan tersebt tidak mempunyai rasa suka. Oleh karena itu, jika kita mengetahui akan adanya sebab atau faktor yang akan mengkaburkan maksud syariat dalam memberlakukan akad nikah sebelum akad tersebut terlaksana, maka kita

-

⁴⁶ Mahmud Syaltut, *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqih*, terj. Abdullah Zakiy, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 123.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib..., 391

harus mencegah sebab yang dapat mengkaburkan maksud dari disyariatkan nikah tersebut. Jika ini tidak dihilangkan maka akad nikah itu dianggap tidak bermanfaat (tidak ada nilainya). 48

2. Persetujuan calon mempelai menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk melengkapi UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan diusahakan secara praktis mendudukanya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan Undang-Undang. KHI secara subtansial mengacu pada hukum Islam, yakni Alquran juga sunnah Rasulallah, dan secara hirarki berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan dan kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UUP disalin kedalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu, KHI (kompilasi hukum Islam) juga disebut sebagai fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Indonesia dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif yang kemudian ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UUP. Hal ini terlihat dari perbedaan jumlah pasal yang di antara keduanya.

Adapun seperti yang telah diketahui bahwasannya Islam mengatur mengenai segala hal yang menyangkut pernikahan, tak terkecuali terkait

48 Muhammad Ra'fat Utsman, Fiqih Kitbah dan Nikah ..., 100.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, 31.

persetujuan mempelai. Meskipun Alquran tidak menjelaskan tentang persetujuan calon mempelai ini, namun hadis Nabi banyak berbicara tentang izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:⁵⁰

" Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya." (HR. Muslim).

Dari hadis Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang akan menikah, bila telah janda maka izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, salah satunya yakni menjadikan diam sebagai indikator kata setuju dari seorang gadis.

Adapun dari hadis tersebut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam hal keperdataan, mengatur tentang harus ada kesepakatan dan kerelaan atau persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut⁵¹:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujan calon mempelai
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin ..., 431.

⁵¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia..., 37.*

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya izin dari calon mempelai terutama pada mempelai perempuan dan sebagai relasi daripada asas skarela maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan demikian dapat dihindari pernikahan paksa. Sebelum melangsungkan pernikahan di KUA turut menyertakan surat persetujuan mempelai (model N3), yang mana hal ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pada saat mendaftarkan pernikahan mereka. ⁵²

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pentingnya persetujuan calon mempelai agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan dengan mengatur pada pasal 17 KHI yang menyatakan sebagai berikut:⁵³

- a. Sebelum melangsungkan perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetjan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang alon memepelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

⁵³ Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi calon mempelai yang mendertia tuna wicara atau tuna rngu persetjuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pada pasal 17 KHI terlihat secara jelas bahwa disini Kompilasi Hukum Islam sangat memperhatikan terkait persetujuan calon mempelai dan mengantisipasi apabila terdapat pernikahan yang terjadi karena paksaan atau tidak disertai persetujuan calon mempelai.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa persetujuan calon mempelai merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan, KHI sebagai pedoman bagi masyarakat muslim dalam perkara keperdataan mengatur mengenai persetujuan dan memaparkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu menanyakan persetujuan calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan di hadapan dua saksi nikah. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak menyetujui pernikahan tersebut (menyatakan keterpaksaan mereka), maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan bentuk penegas bahwa persetujuan calon mempelai adalah aspek yang penting dalam membangun sebuah keluarga dan pernikahan yang dilangsungkan karena dasar paksaan tidak dapat dibenarkan.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA MENANYAKAN PERSETUJUAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

1. Letak Georafis Kantor Urursan Agama

KUA Kecamatan Semampir berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, tepatnya di Jl. Wonokusumo Tengah Nomor 53, Surabaya. KUA Kecamatan Semampir memiliki luas daerah kurang lebih ± 6,6 Km², dengan ketinggian 4,6 meter di atas permuakaan air laut. Adapun banyaknya curah hujan yakni 179,65mm dan suhu udara rata-rata 36°C. Kecamatan Semampir merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis, prulal dan primordial dengan jumlah penduduk mayoritas Madura dan Jawa dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa

b. Sebelah Selatan: Kecamatan Simokerto

c. Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantikan

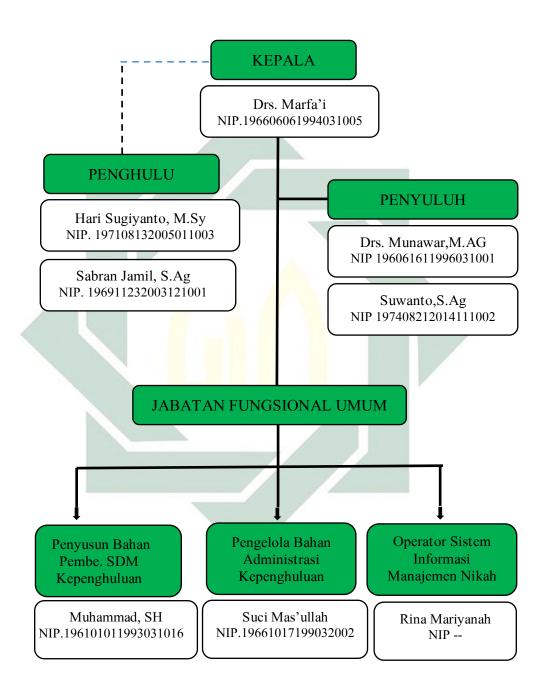
d. Sebelah Timur : Kecamatan Kenjeran

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir

-

¹ Hari Sugianto, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2019.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir memiliki struktur organisasi sebagai berikut:²



3. Visi dan Misi

² Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semampir.

Adapun visi KUA Kecamatan Semampir yakni profesional dan amanah dalam kegiatan pelayanan umat pada bidang agama Islam di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Misi KUA Kecamatan Semampir untuk meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos, meningkatkan pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga sakinah, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal dan kemitraan umat serta meningkatkan pembinaan manasik haji.³

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok KUA Kwcamatan Semampir adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sedangkan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- Menyelenggarakan srat menyurat, pengursan surat, kearsipan,
 pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial
- e. Melaksanakan pembinaan manasik haji tingkat Kecamatan Semampir

³ Hari Sugianto, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2019.

⁴ Ibid

5. Data Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Semampir

Peristiwa nikah di KUA Kecamatan Semampir setiap tahunnya sangat tinggi, adapun data nikah dan rujuk yang tercatat pada tahun 2017-2018 di KUA Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 3.1

Data Nikah dan Rujuk

KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya

No.	Bulan	2017		2018					
		Nikah	Rujuk	Nikah	Rujuk				
1	Januari	142	0	142	0				
2	Februari	87	0	66	0				
3	Maret	107	0	105	0				
4	April	112	0	139	0				
5	Mei	121	0	87	0				
6	Juni	21	0	104	0				
7	Juli	183	0	123	0				
8	Agustus	74	0	179	0				
9	September	255	0	135	0				
10	Oktober	51	0	71	0				
11	Nopember	80	0	74	0				
12	Desember	126	0	0	0				
	Jumlah	1359	0	1225	0				

6. Data Usia Nikah Mempelai KUA Kecamatan Semampir

⁵ Data diperoleh dari Data Pencatatan Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Semampir.

Adapun usia nikah para mempelai yang ada dan terdaftar di KUA Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 3.2

Data Usia Terjadinya Nikah

KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya Kota Surabaya

RENTANG	Tahun 2017		Tahun 2018		
USIA	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
≤ 20 Tahun	94	347	121	418	
21-25 Tahun	493	510	630	589	
26-30 Tahun	344	147	387	232	
> 30 Tahun	349	240	331	230	

B. Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir

1. Tradisi Perjodohan di Kecamatan Semampir

Kecamatan Semampir merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah administrasi kota Surabaya, Kecamatan Semampir memiliki area seluas 8,76 km2 dan terletak di bagian utara kota Surabaya. Wilayah Semampir menempati urutan ketiga penduduk terpadat di Kota Surabaya setelah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Sawahan, yaitu sejumlah 180.672 jiwa yang terdiri dari laki-laki 89.062 jiwa dan

 $^{^{\}rm 6}$ Data diperoleh dari Data Usia Terjadinya Nikah di KUA Kecamatan Semampir.

perempuan 91.610 jiwa. Kecamatan Semampir memiliki lima kelurahan, vakni:⁷

- a. Kelurahan Ampel
- b. Kelurahan Pegirian
- c. Kelurahan Wonokusumo
- d. Kelurahan Ujung

e. Kelurahan Sidotopo

Adapun sebagian besar penduduk Kecamatan semampir adalah suku Madura dan minoritas suku Jawa, hal ini dikarenakan letak kota Surabaya berdekatan dengan pulau Madura, sehingga banyak pendatang dari pulau Madura yang memutuskan untuk merantau bahkan menetap di kota Surabaya terutama di Kecamatan Semampir karena lebih mudah di jangkau melalui jalur darat (jembatan Suramadu). Suku Madura sendiri merupakan suku yang sangat teguh beragama, selain itu beberapa dari masyarakatnya juga dikenal masih memegang erat tradisi leluhur mereka, salah satunya yakni tradisi perjodohan.⁸

Tradisi perjodohan di suku Madura sudah ada sejak lama dan sampai saat ini beberapa masyarakat suku Madura masih ada yang menjalankan tradisi tersebut, bukan hanya masyarakat Madura yang ada di pulau Madura saja tapi juga masyarakat suku Madura yang bermigrasi ke Surabaya, seperti di Kecamatan Semampir dan hal inilah yang

⁷ Valdi Firstianto et al. "Profil Kependudukan Kecamatan Semampir" (Skripsi--Institut Teknologi Surabaya, Surabaya, 2015).

⁸ Ibid

menyebabkan tingginya tingkat perjodohan di Kecamatan Semampir.⁹ Adapun perjodohan tersebut biasanya terjadi pada beberapa masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa memaksa anak untuk menikah itu dilarang. Perjodohan terjadipun tidak hanya pada anak mereka yang sudah masuk usia siap menikah saja tapi beberapa orang tua yang menjodohkan anak mereka sejak mereka masih kecil, bahkan ada beberapa dari masyarakat suku Madura yang menikahkan anak mereka dengan kerabat jauh ataupun teman dekat mereka. Beberapa dari mereka juga masih menganggap bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anaknya dan memaksa anak mereka untuk menikah merupakan hal yang biasa karena demi masa depan mereka yang lebih baik.¹⁰

Faktor yang melatar belakangi para orang tua lebih memilih untuk menjodohkan anak mereka yakni untuk mempererat jalinan silaturahim agar tetap terjalin dengan baik, rasa takut orang tua apabila nanti anak mereka salah memilih pasangan hidup, agar orang tua lebih mudah memantau anak mereka karena antara dua keluarga sudah saling mengenal,bahkan ada yang mennjodohkan anak mereka dengan kerabat mereka dengan alasan agar harta yang dimiliki keluarga tetap dikuasai oleh keluarga itu sendiri dan tidak jatuh kepemilikan atau kekuasaan pada orang asing diluar keluarga tersebut.¹¹ Akan tetapi, ada pula orang tua

.

¹¹ Ibid

⁹ Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 23 April 2019.

¹⁰ Hari Sugianto, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2019.

yang menjodohkan anak mereka karena sebelumnya sudah terikat perjanjian. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang responden penulis, bapak Rianto yang menyatakan bahwa beliau menjodohkan anaknya dengan kerabat jauh dari orang tuanya, alasan beliau menjodohkan anaknya adalah karena sebelumnya antara orang tua bapak Rianto dan orang tua besannya tersebut telah sepakat akan menjodohkan anak mereka dan seharusnya yang dijodohkan adalah bapak Rianto, namun karena mereka terpisah jauh dan sempat hilang kabar selama puluhan tahun, perjodohan diantara mereka tak terlaksana.

Setelah beberapa puluh tahun tak bersua, akhirnya keluarga mereka dipertemukan kembali, namun saat itu bapak Rianto telah berkeluarga. Hal tersebut tak lantas membuat kesepakatan diantara kedua keluarga tersebut gugur. Bagi keluarga bapak Rianto janji adalah hutang yang wajib dibayar dan perjanjian orang tuanya bagi pak Rianto sudah seperti wasiat baginya. Maka dari itu bapak Rianto kemudian tetap melanjutkan kesepakatan perjodohan tersebut pada anaknya. ¹²

Perjodohan yang dilakukan oleh keluarga bapak Rianto selain karena adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, juga untuk mengikat persaudaraan antara dua keluarga agar tali silaturrahim antara dua keluarga tersebut tidak putus. Selain itu Bapak Riyanto juga menyatakan bahwa baginya perjodohan itu hal yang biasa, mengingat bahwa hal tersebut sudah merupakan tradisi keluarga dan usia anaknya

¹² Rianto, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2019.

_

telah masuk usia menikah jadi wajib baginya untuk mencarikan jodoh untuk anaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh responden lain, yakni Munawarah. Usia Munawarah baru memasuki 19 tahun dan ia telah memiliki seorang anak. Pada saat ia beusia 17 tahun ia dijodohkan oleh orang tuanya, saat itu orang tuanya mengatakan padanya bahwa ia harus menikah dengan saudara dari teman ibunya agar ada yang menjamin hidupnya. Munawarah menolak permintaan ibunya karena ia masih ingin bekerja dan menikmati masa mudanya terlebih dahulu, namun orang tuanya meminta kepada Munawarah untuk menerima laki-laki pilihan mereka karena laki-laki tersebut adalah laki-laki baik, nasabnya jelas dan telah memiliki pekerjaan tetap, mereka beranggapan jika Munawarah Menikah dengan laki-laki pilihan mereka hidup Munawarah akan bahagaia. 13

Munawarah menolak permintaan orang tuanya karena masih ingin bekerja seperti teman-temannya yang lain, namun orang tuanya tak mengindahkan permintaannya, mereka mengatakan bahwa Munawarah tidak tahu bagaimana kehidupan sebenarnya dan jika ia bekerja mereka takut Munawarah akan salah pergaulan dan salah memilih pasangan. Jika Munawarah menikah dengan laki-laki tersebut setidaknya akan ada yang menjaganya dan menjamin segala kebutuhannya. Bahkan orang tuanya berkata bahwa dia tidak boleh melawan dan harus nurut apa kata orang

¹³ Munawarah, Wawancara, Surabaya: 17 Oktober 2019

tua karena orang tua lebih tahu apa yang baik bagi dirinya. Akhirya dengan berat hati Munawarah menerima permintaan orang tuanya dan mereka menikah.¹⁴

Pada saat proses pernikahan ia mengatakan bahwa tidak ada yang menanyakan perasaannya baik kelarganya maupun penghulu. Munawarah masih berharap ada yang memberikan pengertian pada orang tuanya karena ia tidak ingin menikah terlebih dahulu, namn apalah daya ia hanya bisa diam dan mengikuti semua proses pernikahan. Selama menikah ia terkadang masih ada rasa sesal dan kecewa, karena ia ingin seperti temanteman sebayanya, bekerja dan menikmati masa mudanya. Namun sejak menikah dan menyandang status sebagai istri suaminya melarang ia banyak bergaul dengan temanya dan melarangnya bekerja, apalagi sekarang ia telah menjadi seorang ibu, banyak hal yang ia fikirkan dan ia merasa semua tanggung jawab tersebut menjadi beban baginya. Akan tetapi, semua telah terjadi dan ia tidak mngkin membatalkan apalagi meminta cerai mengingat ia telah dikaruniai seorang anak, ia hanya bisa pasrah menerima segalanya. ¹⁵

Perjodohan serupa juga dialami oleh Nurul. Nurul menikah pada tahun 2017, saat itu ia baru saja menamatkan pendidikannya di sebuah pondok pesantren dan orang tuanya memutuskan untuk menjodohkannya. Orang tuanya merasa perjodohan ini baik untuk Nurul karena laki-laki yang hendak dijodohkan dengannya adalah murid dari Kyai kenalan

14 Ibid.

¹⁵ Ibid.

mereka, mereka bahkan telah menerima pinangan keluarga laki-laki tersebut tanpa sepengetahan Nurul. Pada saat mengetahui hal tersebut Nurul tidak mengiyakan permintaan orang tuanya untuk melanjutkan pinangan tersebut, karena Nurul tidak ingin menikah dulu terlebih ia juga tak mengenal laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Akan tetapi, orang tua Nurul masih bersikukuh untuk melanjutkan perjodohan tersebut, mengingat laki-laki tersebut merupakan kenalan seorang Kyai yang juga teman kakek Nurul.¹⁶

Orang tuanya terus memaksa Nurul untuk menerima laki-laki tersebut, mereka juga mengatakan pada Nurul bahwa sebagai perempuan tidak baik menolak lamaran apalagi membatalkan, nanti bisa kualat (terkena karma), belum lagi apa kata tetangga terhadapnya jika ia membatalkan pertnangan itu. Nurul kemudian dengan berat hati mengiyakan permintaan orang tuanya karena selalu dipaksa orang tuanya bahkan tidak hanya orang tuanya saja tapi juga kakek dan neneknya, lantas mereka akhirnya menikah. Pada saat mendaftarkan pernikahan Nurul hanya mengikuti apa yang diperintah orang tuanya, ia tidak ikut mempersiapkan apapun. Bagi Nurul pelaksanaan akad nikah saat itu berlangsung cepat dan singkat, karena ia saat tak berada di majelis akad dan ia hanya bisa menahan rasa sedih, ia merasa tak percaya bahwa ia benar-benar menikah dengan lelaki yang tak ia kenal sebelumnya. 17

-

¹⁷ Ibid

¹⁶ Nurul, Wawancara, Surabaya, 19 Oktober 2019.

Pelaksanaan perjodohan bagi sebagian orang tua terkadang dianggap sebagai solusi terbaik untuk anak mereka agar tidak salah pilih pasangan hidup mereka dan bisa hidup bahagia di kemudian hari, karena menikah adalah peristiwa sakral yang diharapkan terjadi sekali seumur hidup. Bahkan banyak orang tua yang menomor duakan persetujuan atau perasaan sang anak, karena mereka merasa sangat yakin bahwa keputusan merekalah yang terbaik. Seperti kasus yang terjadi di atas yang mana orang tua (wali) telah menerima pinangan calon suaminya tersebut tanpa izin sang anak terlebih dahulu. Hal serupa juga terjadi pada Halimah yang juga merupakan korban perjodohan, pada saat dijodohkan oleh orang tuanya ia tidak mengetahui bahwa sebelumnya orang tuanya telah menerima lamaran atau pinangan calon suaminya tersebut.¹⁸

Halimah mengetahui hal tersebut sehari sebelum calon suaminya datang ke rumah bersama keluarganya untuk membahas perencanaan menikah, dia benar-benar tak mengenal ataupun tahu siapa laki-laki tersebut sebelumnya. Saat kejadian orang tua Halimah mengatakan bahwa laki-laki tersebut telah meminangnya beberapa bulan yang lalu, mereka tak mengatakan pada Halimah karena menurut orang tuanya laki-laki tersebut orang baik dan jelas nasabnya, maka hidup Halimah pasti akan terjamin. Mereka juga meminta Halimah untuk menerima semuanya dan mengatakan bahwa bahwa dia tak boleh melawan pada orang tua bisa berdosa besar hidupnya tidak berkah. Halimah yang takutpun hanya bisa

_

¹⁸ Halimah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Mei 2019.

diam dan menuruti kemauan orang tuanya, hingga akhirnya ia resmi menikah.¹⁹

Dalam menjalani pernikahannya Halimah mengaku bahwa terkadang masih ada rasa sesal mengingat soal perjodohannya, karena ia pada dasarnya tidak mau menikah terlebih dahulu dan masih bekerja seperti teman sebayanya. Pada saat dijodohkan Halimah masih berusia belasan tahun dan masih belum siap menikah. Akan tetapi, bagaimanapun ia tak dapat menolak permintaan orang tuanya dan takut hidupnya tidak berkah bila menentang keinginan orang tua. Selama menikah Halimah terkadang mengalami cekcok karena kenyataannya suaminya tak seperti apa yang dikatakan orang tuanya dan pada saat itu terkadang ia berfikir untuk mengakhiri pernikahannya, namun ia takut bila menyangdang status janda ia akan sulit menemukan jodoh dan menjadi bahan gunjingan masyarakat.²⁰

2. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Semampir

Sebelum melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Bapak Marfa'i selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir menyatakan bahwa calon mempelai harus memenuhi syarat umum yang ada terlebih dahulu, karena suatu pernikahan tidak akan dapat dilangsungkan apabila syarat umum (rukun) ini tidak dipenuhi, diantaranya yakni kedua calon mempelai ada dan jelas (tidak memiliki halangan untuk menikah), usia mempelai sesuai dengan batas usia yang

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

ditentukan, yakni 19 tahun untuk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan 16 tahun. Akan tetapi, apabila usia calon mempelai belum memenuhi syarat bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Selain itu, kedua mempelai harus mendatangkan wali yang memenuhi syarat sesuai hukum Islam (Muslim, berakal, balig serta sesuai tuntunan nasabnya) dan dua orang saksi laki-laki yang telah disepakati dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi.²¹

Setelah melengkapi syarat utama (rukun) untuk menikah, calon mempelai bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan dengan membawa berkas administrasi yang telah ditentukan dari Kelurahan, meliputi berkas identitas calon mempelai, surat keterangan belum menikah, surat keterangan kematian suami/istri atau akta cerai bagi janda/duda, bukti imunisasi TT dari puskesmas dan blanko nikah (from model N), yakni seperti berikut:²²

- a. Surat pengantar perkawinan (Model N1)
- b. Surat permohonan kehendak nikah (Model N2)
- c. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- d. Surat keterangan izin orang tua (Model N4)

Adapun dalam hal persyaratan administrasi dan rukun nikah disini, Kecamatan Semampir sesuai dengan ketentuan yang ada, calon mempelai juga diharuskan mengikuti rafa' atau pemeriksaan berkas nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah semua prosedur telah dilewati dan

_

²¹ Sabran Jamil, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

²² Ibid.

terpenuhi maka calon mempelai dapat melangsungkan akad nikah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, jalannya pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan semampir pun sama dengan KUA pada umumnya yakni ada calon mempelai, wali hadir untuk mengucap ijab atau dengan pasrah wali kepada orang yang dikehendaki, dihadiri dua orang saksi laki-laki dan mengucapkan ijab kabul dalam satu majelis.²³

Akan tetapi, pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir setiap tahunnya terbilang sangat padat, karena KUA Keamatan semampir merupakan KUA tipe A yang mana pencatatan nikahnya mencapai angka 100 peristiwa setiap bulannya. Bapak Sabran Jamil selaku Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah mengatakan bahwa beliau kadang merasa kewalahan ketika jadwal menikahkan sedang banyak, terlebih tidak semua keluarga mempelai tepat waktu datang ke KUA ataupun saat di rumah, terkadang ada saja kendala yang membuat pelaksanaan akad nikah molor (terlambat) dan hal-hal semacam itulah yang membuat Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah menyingkat atau mengelolah waktu pelaksanaan akad nikah sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang juga akan melangsungkan akad nikah setelahnya.²⁴

Pihak Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah biasanya mempersingkat beberapa sesi pelaksanaan akad nikah agar akad nikah yang ada berjalan efisien dan cepat, namun juga tetap memperhatikan

²³ Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁴ Sabran Jamil, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti halnya dalam menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum pelaksanaan akad nikah, pada praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir, penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ada pada saat pelaksanaan akad nikah tidak melaksanakan hal tersebut guna mengatur kelola waktu agar cepat dan tepat waktu.

Adapun dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan Semampir menyatakan bahwa beliau mengetahui terkait peraturan dan tata cara pelaksanaan nikah tersebut. Namun, untuk pernyataan persetujuan mempelai telah terlampir pada lembar N3 (formulir persetujuan calon mempelai), maka dari itu bagi calon mempelai yang datang ke KUA dan telah melengkapi berkas formulir model N termasuk didalamnya lembar N3 (persetujuan calon mempelai) diangggap telah menyetujui adanya pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵

Faktor lain seperti latar belakang masyarakat Kecamatan Semampir juga membuat pihak KUA tidak mungkin untuk terlalu masuk kedalam permasalahan keluarga tersebut karena merasa bukan ranah pihak KUA, karena tidak semua keluarga bersedia urusannya dicampuri pihak lain. Bapak Marfa'i selaku Kepala KUA Kecamatan Semampir juga memahami kondisi masyarakat di KUA Kecamatan Semampir yang mayoritas suku Madura yang mana suku Madura dikenal keras juga sensitif terhadap permasalahan keluarga, pihak KUA menganggap

²⁵ Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 23 April 2019.

menanyakan persetujuan mempelai pada saat sebelum akad nikah akan menampakkan kesan sedikit tabu. Akan tetapi, beliau menyatakan bahwa beliau masih menanyakan terkait keyakinan kedua calon mempelai untuk menikahi pasangannya, namun bukan sebelum pelaksanaan akad nikah melainkan pada saat rafa' (pemeriksaan berkas) nikah.²⁶

Jadi terkait persetujuan calon mempelai ini dinilai atau dilihat ketika calon mempelai bersedia datang untuk rafa' nikah dan melengkapi semua persyaratan yang ada termasuk lembar persetujuan (N3), maka bagi pihak KUA calon mempelai tersebut telah menyetujui pernikahan yang terjadi atas dirinya. Namun apabila selama saat rafa' atau sebelum akad nikah dilangsungkan calon mempelai menyatakan ketidakrelaannya atau keberatannya dan menghubungi pihak KUA, barulah akan diurus terkait permasalahan mereka, jika tidak ada maka pernikahan akan tetap dilangsungkan sesuai jadwal yang telah ada.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Hari (Penghulu KUA Kecamatan Semampir) selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ada dalam pelaksanaan akad nikah, selain faktor tersebut terkadang kondisi dan waktu tidak memungkinkan. Seperti halnya dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan semampir yang tinggal di Kelurahan Ampel yang mana masyarakatnya merupakan keturunan arab dan mereka dalam menikahkan biasanya mengikuti tradisi memisah

²⁶ Ibid.

mempelai perempuan saat akad nikah dan baru mempertemukan kedua mempelai saat akad telah selesai.²⁷

Pernyataan tersebut juga dibenarkan Bapak Sabran Jamil yang juga merupakan Penghulu di KUA Keamatan Semampir, beliau menyatakan penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah biasanya melakukan pemeriksaan data nikah pada saat rafa' nikah, ketika persyaratan sudah terpenuhi termasuk lembar N3 tersebut maka pernikahan dapat dilangsungkan dan pada saat pelaksanaan akad nikah kami tinggal mengeksekusi saja. Pada saat akad nikahpun terkadang tidak memungkinkan untuk menanyakan terkait persetujuan calon mempelai karena beberapa masyarakat Kecamatan Semampir dalam pelaksanaan akad nikah mereka mempelai perempuannya tidak berada dalam satu majelis, biasanya mempelai perempuannya berada dalam bilik atau ruang lain.²⁸

Selain faktor di atas pihak KUA juga menyatakan bahwa menanyakan persetujuan calon mempelai terkadang tidak memungkinkan karena padatnya jadwal nikah atau pristiwa nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir. KUA Kecamatan Semampir merupakan KUA kategori A yang mana pristiwa nikah setiap tahunnya tercatat sekitar 1000 lebih calon mempelai, hak tersebut membuat waktu serta kondisi tidak memungkinkan untuk ditanyakan terlebih dahulu terkait persetujuannya karena akan memakan waktu lebih lama, belum lagi para

.

²⁷ Hari sugianto, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2019.

²⁸ Sabran Jamil, *Wawanara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

pihak tidak semuanya dapat tepat waktu, terkadang ada saja permasalahan atau kendala yang terjadi, sehingga pihak KUA sebisa mungkin mempersingkat waktu agar pihak yang lain tidak merasa dirugikan atas hal tersebut. Akan tetapi saat peristiwa nikah di KUA sedang sedikit (tidak sepadat biasanya) dan waktu memungkinkan, petugas atau penghulu akan tetap menanyakan persetujuan calon mempelai tersebut.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa alasan Petugas Pencatat Nikah/Penghulu KUA Kecamatan Semampir tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi pada saat pelaksanaan nikah yakni sebagi berikut:

- a. Karena ada lembar N3 (lembar persetujuan calon pengantin) dan penghulu merasa hal tersebut telah mencakup izin dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahannya maka pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat.
- b. Pihak atau penghulu KUA Kecamatan Semampir kurang memperhatikan peraturan yang berlaku dan tata cara peaksanaan nikah tentang menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- c. Pihak KUA tidak bisa masuk terlalu dalam kedalam permasalahan keluarga mempelai karena tidak semua keluarga bersikat terbuka maka calon mempelai yang bersedia hadir pada saat rafa' juga

.

²⁹ Ibid.

- ditanyakan terkait persetujuan mereka dan mereka membawa persyaratan lengkap dengan N3 (lembar persetujan) dianggap telah menyetujui adanya pernikahan atas diri mereka.
- d. Keterbatasan waktu yang ada karena banyaknya pristiwa nikah yang terjadi setiap harinya dan tidak semua pelaksanaan akad nikah berjalan tepat waktu, jadi pihak KUA Kecamatan Semampir sebisa mungkin untuk meminimalisir adanya keterlambatan agar tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Tradisi menikah di Kecamatan Semampir yang beberapa masyarakatnya memakai tradisi Arab, dimana calon mempelai tidak berada satu majelis atau berada di tempat terpisah pada saat akad nikah dilangsungkan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TANPA MENANYAKAN PERSETUJAN CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Analisis Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Pernikahan merupakan ikatan sakral nan suci diantara seorang lakilaki dan perempuan untuk berkembang biak serta meneruskan keturunan mereka, pernikahan juga merupakan perintah Allah bagi umat manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah serta rahmah diperlukan aspek persetujuan (kerelaan) kedua belah pihak dalam hal ini, terutama pada kedua calon mempelai.

Seperti yang diketahui, persetujuan calon mempelai merupakan hal penting yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, karena berdampak banyak bagi kelangsungan hidup dalam bahtera rumah tangga pasangan suami dan istri, karena pernikahan takkan terasa indah dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera tidak akan tercapai apabila salah satu atau kedua mempelai tidak memiliki rasa ingin atau terpaksa dalam menjalani rumah tangga mereka. Pernikahan yang dilangsungkan atas dasar kemauan diri (kerelaan) akan jauh lebih baik dan lebih ikhlas dalam menjalani setiap hari-harinya, kalaupun di tengah

peralanan terjadi perselisihan akan lebih mudah menemukan jalan keluar karena sebeluumnya dia telah memutuskan untuk menikah dan menerima pasangannya, beda dengan pasangan yang menikah karena dijodohkan terlebih bila perjodohan tersebut mengandung unsur paksaan.

Adapun pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan atau tanpa ada kerelaan calon mempelai tidak dibenarkan, karena menyalahi hak kedua mempelai untuk bebas memilih pasangan juga menentukan jalan hidup mereka. Akan tetapi, tidak menampik kemungkinan hal tersebut terjadi di sekitar kita, seperti halnya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, meskipun Surabaya merupakan kota besar dan modern namun masih ada beberapa masyarakatnya yang menjadikan perjodohan sebagai alternatif untuk mendapatkan pasangan yang baik bagi anak mereka, bahkan dalam perjodohan tersebut orang tua banyak mengabaikan pendapat ataupun perasaan anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menganalisis terkait beberapa faktor yang menyebabkan perjodohan masih banyak terjadi di kecamatan Semampir, yakni sebagai berikut:

- 1. Tradisi yang telah terjadi secara turun temurun.
- Anggapan masyarakat bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak mereka dan ketidaktahuan mereka bahwa memaksa anak untuk menikah adalah hal yang tidak dibenarkan.

- Guna mengikat tali silaturahim antara dua keluarga agar tidak terputus, perjanjian yang disepakati sebelumnya dan beberapa faktor kekeluargaan yang lain.
- 4. Rasa takut orang tua bila anak mereka salah pilih pasangan hidup dan gagal dikemudian hari.
- 5. Kurangnya pengetahan beberapa masyarakat terhadap larangan memaksa anak untuk menikah karena latar belakang pendidikan mereka.

Perjodohan memang tak selalu berdampak buruk bagi calon mempelai, namun tidak sedikit orang tua yang mengabaikan pendapat anak mereka dalam perjodohan dan sang anak seringkali merasa tidak yakin serta terpaksa dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Seperti yang terjadi pada responden penulis dimana orang tua merasa pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik bagi masa depan anak mereka dan takut anak mereka salah pilih pasangan apabila dibiarkan untuk mencari jodoh sendiri, sehingga mengabaikan perasaan anak mereka dan memaksakan kehendak mereka pada anak mereka. Namun, tidak semua hal yang baik bagi orang tua baik juga menurut anak mereka, karena dalam hal pernikahan anaklah yang nantinya menjalani bahtera rumah tangga mereka bukan orang tua.

Pernikahan bukanlah hal yang sepele dan bisa dianggap remeh, karena pernikahan merupakan ikatan sakral yang mestinya terjadi sekali seumur hidup yang mana tujuan dari pernikahan tersebut yakni guna membentuk keluarga bahagia, penuh cinta, aman dan sejahtera. Adapun dalam menjalani bahtera rumah tangga banyak hal yang nantinya akan dilalui dan bila sejak

awal salah satu calon mempelai atau bahakan keduanya tidak memiliki rasa cinta juga merasa tidak cocok atau terpaksa satu sama lain maka akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi keduanya dan pernikahan mereka lebih rentan permasalahan bahkan bukan tidak mungkin perceraian bisa saja terjadi diantara mereka.

Adapun dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Semampir pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain, sebelum melangsungkan akad nikah terdapat syarat atau rukun yang harus dipenuhi diantaranya yakni:

- 1. Calon suami dan istri
- 2. Wali,
- 3. Saksi serta
- 4. Ijab dan Kabul serta syarat-syarat yang termaktub di dalamnya.

Calon mempelai yang telah telah memenuhi persyaratan (rukun) nikah di atas, maka mereka bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA dengan membawa beberapa berkas yang diperlukan dan juga blanko menikah (formulir model N1-N3) yang didapat dari Kelurahan setempat. Ketika semua syarat telah terpenuhi maka calon mempelai harus mengikuti rafa' nikah (pemeriksaan berkas nikah), barulah pernikahan dapat didaftarkan untuk kemudian dilangsungkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Terkait persyaratan pendaftaran menikah KUA Kecamatan Semampir sama dengan KUA yang lain dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada tanpa mengurang atau menambah apapun. Akan tetapi, pada observasi yang dilakukan penulis, penulis mendapati dalam pelaksanaan akad

nikah pihak KUA Kecamatan semampir tidak menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum pernikahan dilangsungkan.

Adapun dari beberapa paparan hasil wawancara terhadap Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa faktor atau sebab Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu KUA Kecamatan Semampir tidak menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi pada saat pelaksanaan nikah yakni sebagi berikut:

- f. Sudah ada lembar N3 (lembar persetujuan calon pengantin) sehingga penghulu merasa hal tersebut telah mencakup izin dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahannya.
- g. Pihak penghulu atau PPN kurang memperhatikan peraturan yang berlaku tentang tata cara pelaksanaan nikah, yakni dalam menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- h. Pihak KUA tidak bisa masuk terlalu dalam pada permasalahan keluarga mempelai karena tidak semua keluarga bersikap terbuka dan oleh karena itu calon mempelai yang bersedia hadir pada saat rafa' serta membawa persyaratan lengkap dengan N3 (lembar persetujan) dianggap telah menyetujui adanya pernikahan atas diri mereka.
- Keterbatasan waktu yang ada karena banyaknya peristiwa nikah yang terjadi setiap harinya dan tidak semua pelaksanaan akad nikah berjalan tepat waktu. Jadi pihak KUA Kecamatan Semampir meminimalisir waktu

pelaksanaan akad nikah agar tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- j. Beberapa masyarakat di Kecamatan Semampir memilih menggunakan tradisi Arab dalam pernikahan, dimana calon mempelai tidak berada satu majelis atau berada di tempat terpisah pada saat akad nikah dilangsungkan.
- k. Pihak penghulu atau PPN kurang memperhatikan terkait peratran yang berlaku tentang tata cara pelaksanaan nikah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Semampir tidak jauh berbeda dengan KUA yang lain, sebelum melangsungkan akad nikah calon mempelai diharuskan memenuhi syarat utama untuk menikah, yakni calon suami dan istri, wali, saksi dan ijab kabul. Adapun syarat tersebut harus ada dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum ingin mendaftarkan pernikahan karena pernikahan tidak akan berjalan tanpa adanya salah satu dari keempat syarat di atas, selain itu calon mempelai juga harus memenuhi syarat administrasi yang berlaku dan telah ditentukan.

Terkait pelaksanaan nikah yang ada di KUA Kecamatan Semampir menurut penulis telah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun menikah dalam hal ini terpenuhi dan tidak menyalahi syari'at agama, seperti harus ada calon mempelai yang jelas dan keduanya tidak ada halangan menikah,

wali harus sesama muslim, balig dan berakal hadir untuk mengucap ijab atau bisa di wakilkan pada orang lain yang berhak dan dikehendaki, mendatangkan dua orang saksi laki-laki beragama muslim yang telah balig dan sehat jasmaninya, dan kemudian pelafalan ijab kabul dalam satu majelis diucapkan dengan jelas dan tegas.

Akan tetapi, seperti yang diketahui pada saat pelaksanaan akad nikah Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir tidak menanyakan persetujuan calon mempelai, hal tersebut dikarenakan kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan. Menurut bapak Marfa'i selaku Kepala KUA Kecamatan Semampir terkait persetujuan telah dinyatakan dalam berkas N3 (form persetujuan calon mempelai), selain itu pihak KUA juga tidak bisa masuk lebih dalam lagi dalam permasalahan keluarga mengingat latar belakang masyarakat Kecamatan Semampir yang dikenal keras atau sensitif terhadap masalah yang menyangkut kehidupan pribadi keluarga mereka. Meskipun pihak KUA mengetahui terkait tingginya perjodohan di Kecamatan Semampir, selama tidak ada pernyataan tegas bahwa mereka menolak adanya pernikahan tersebut proses pernikahan akan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi dasar Penghulu tidak menanyakan terkait persetujuan calon mempelai adalah calon mempelai telah memenuhi berkas yang ada termasuk mengisi lembar N3 (lembar persetujuan), terlebih mereka berkenan untuk hadir pada saat *rafa*' nikah, maka pernikahan mereka bisa

dilaksanakan. Faktor lain yang menjadi alasan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah yakni terkait waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan. Mengenai menanyakan persetujuan kedua calon mempelai meskipun tidak ditanyakan di hadapan dua saksi nikah, namun hal ini telah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semampir pada saat *rafa'* nikah bersama kedua orang tuanya.

Adapun menanyakan persetujuan di hadapan dua saksi nikah telah jelas diatur pada pasal 17 KHI sebagai bentuk realisasi asas kerelaan dalam pernikahan. Namun pada praktiknya pihak KUA Kecamatan Semampir tidak mengimplementasikan atau melaksanakan pasal tersebut dengan alasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya.

Menurut penulis, terkait persetujuan itu sendiri laki-laki lebih berhak atas diri mereka dan memiliki hak untuk memilih pasangan mereka karena laki-laki cenderung lebih bisa menentukan juga mengemukakan pendapatnya dibanding perempuan. Adapun bagi perempuan penulis sependapat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Muhammad Syaltut dan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa seorang janda berhak atas dirinya termasuk dalam pernikahan dan untuk anak gadis yang telah dewasa kedudukannya disamakan dengan janda dalam hal mendapat hak untuk mengurusi dirinya, karena gadis yang telah dewasa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya dan mereka juga lebih lugas serta tidak malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya. Terlebih bila melihat zaman seperti sekarang biasanya seorang gadis yang dewasa ketika

dia enggan terhadap sesuatu dan tetap dipaksa untuk melakukannya, mereka cenderung acuh dan memberontak, hal tersebut dirasa akan berimbas buruk bagi kesehatan mentalnya juga kelangsungan rumah tangga dan keturunan mereka kelak.

Bagi gadis yang belum dewasa, penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa orang tua boleh menikahkan anak mereka (dalam artian memilihkan jodoh untuk sang anak), namun tidak untuk memaksakan kehendak kepada anak tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Menurut penulis, sebagai seorang anak mereka juga memiliki hak untuk menentukan pilihannya (setuju atau tidak dinikahkan dengan laki-laki pilihan walinya), maka orang tua harusnya meminta izin atau berunding terlebih dahulu dengan sang anak karena hal ini menyangkut masa depan mereka. Sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa perempuan yang masih belum menikah (gadis) harus dimintai izinnya dan indikasi setujunya perempuan adalah diamnya, berdasarkan hadis Rasulallah yakni sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda "seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk dan tanda izinnya adalah diamnya." (HR Imam Muslim)

Pada hadis di atas jelas menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya yang mana berarti dalam hal pernikahan seorang janda berhak menentukan pilihan yang menyangkut dirinya, termasuk perkara pernikahan dan bagi wali tidak memiliki hak untuk menentukan apalagi memaksa dengan siapa dan orang yang seperti apa yang akan menjadi suaminya.

Adapun untuk anak gadis, hadis tersebut menyatakan bahwa dia diajak berembuk terlebih dahulu untuk melihat apakah dia setuju atau tidak pada jodoh pilihan walinya dan diamnya adalah tanda setujunya atau izinnya. Jadi dalam hal ini wali memiliki hak ntuk menikahkan anak mereka, namun ia tetap dimintai izin atau pendapat terkait pernikahan yang akan dia langsungkan dan diamnya merupakan bentuk persetujuannya.

Wali juga harus mengetahui indikasi diamnya anak gadis tersebut apakah menunjukkan setuju atau sebaliknya, maka dari itu para Ulama menyunnahkan untuk mengutus perempuan lain yang terpercaya dalam meminta izin kepada anak gadis yang akan dinikahkan, karena seorang perempuan biasanya cenderung lebih malu-malu dan takut untuk mengutarakan perasaan serta pendapat mereka pada oranglain apalagi menyangkut urusan pribadi mereka seperti pernikahan. Mereka akan lebih terbuka dan leluasa menyampaikan isi hatinya pada sesama perempan terlebih pada ibunya sendiri.

Persetujuan calon memepalai merupakan syarat yang berpengaruh penting, karena hal ini menyangkut masadepan kedua calon mempelai dan kehidupan berumah tangga mereka. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila salah satu atau kedua mempelai tidak memiliki

rasa ingin atau terpaksa dalam menjalani rumah tangga mereka. Menurut penulis pernikahan yang dilakukan dengan paksaan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan rentan permasalahan dalam rumah tangganya.

Seperti halnya yang terjadi pada responden penulis di Kecamatan Semampir, dimana dalam perjodohan yang ada mengabaikan pendapat juga perasaan anak yang dijodohkan dan anak tersebut melangsungkan pernikahan mereka dengan rasa tidak yakin bahkan terpaksa, maka yang terjadi adalah responden atau anak yang dijodohkan jadi merasa tidak tentram menjalani rumah tangganya karena adanya perasaan tertekan menjalani semuanya, bahkan hingga berujung dengan perceraian dan mengakibatkan rasa trauma pada responden untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis terkait persetujuan calon memepalai ini harus benar-benar diperhatikan dan dilihat lebih dalam lagi agar rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut lebih terasa bahagia dan nyaman.

Seperti yang diketahui dalam praktiknya, masih ada beberapa orang yang menjodohkan anak mereka dan kurang memperhatikan perasaan anak mereka, akrena mereka menganggap bahwa sebagai wali mereka memiliki hak untuk menikahkan anak mereka dan merasa bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik bagi masadepan anak mereka, sehingga seringkali mengabaikan pendapat anak mereka dan memaksakan kehendak mereka untuk menikahkan anak mereka dengan pilihan mereka.

Penulis berpendapat inilah yang menjadikan sebelum melangsungkan akad nikah Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan terkait persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ternyata salah satu mempelai menyatakan ketidak setujuannya. Mengingat tingginya tingkat perjodohan di Kecamatan Semampir, maka dengan ditanyakannya persetujuan sebelum pelaksanaan akad nikah di hadapan dua saksi nikah ini akan membuat kedua calon mempelai tidak merasa tertekan atau terintimidasi ketika menyatakan perasaan (persetujuan) mereka. Selain itu orang tua tidak dapat memaksa atau mempengaruhi pernyataan mempelai dan memberikan jalan kepada kedua calon mempelai untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan sebenar-benarnya. Ketika kedua calon mempelai menyatakan keridhaannya dengan tegas dan excited (bersemangat) maka mengindikasikan bahwa mereka benar-benar rela dan ridha untuk dinikahkan dengan pasangan mereka. Akan tetapi, ketika salah satu atau kedua calon mempelai tampak tertekan dan ragu menjawab pertanyaan Penghulu atau PPN bahkan menyatakan ketidak setujuannya maka pihak Pencatat Nikah bisa menanyakan (menegaskan) kembali apakah mereka terpaksa melakukan pernikahan tersebut. Apabila memang ada unsur paksaan dalam pernikahan ini dan mempelai tidak setuju maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Menurut penulis, meskipun pihak Pegawai Pencatat Nikah menyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai telah dinyatakan pada lembar

persetujuan model N3 dan mereka juga menanyakan keyakinan kedua calon mempelai pada saat *rafa'* nikah, namun hal ini harusnya tidak merubah ketentuan yang ada dan penghulu harusnya tetap mengimplementasikan peraturan tersebut, terlebih pihak KUA Kecamatan Semampir mengetahui bahwa tingkat perjodohan yang ada di Kecamatan Semampir tinggi. Hal ini guna menghindari hal-hal yang mengkaburkan tujuan menikah itu sendiri dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memastikan lebih dalam terkait apakah pernikahan tersebut didasarkan kerelaan mempelai, karena dalam mengisi pernyataan lembar N3, calon mempelai saat itu dipengaruhi tekanan dan merasa takut pada orang tua maka mereka terpaksa menandatangani lembar persetujuan tersebut.

Pada pasal 16 KHI menyatakan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka jelas bahwa pernikahan yang berlangsung atas dasar paksaan tidak dapat dibenarkan. Adapun peraturan pasal 17 KHI menurut penulis merupakan bentuk realisasi asas persetujuan tersebut dan hadis yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintau izin atau persetujuan darinya. Berdasarkan hal ini pasal 17 KHI menegaskan terkait pentingnya persetujuan calon mempelai dengan menanyakan kembali persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan. Menurut penulis hal ini guna mengantisipasi adanya pernikahan secara paksa, karena apabila salah

satu atau kedua pasangan menyatakan ketidak setujuannya maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Ketentuan pada pasal 17 KHI tersebut juga dapat dipahami sebagai himbauan bagi masyarakat yang masih menganggap bahwa hak ijbar bagi wali untuk memaksa anak mereka menikah masih dibenarkan. Terlebih diamnya perempuan yang dianggap salah satu bentuk persetujuan terhadap perkawinan, terkadang juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan orang tua dalam memaksakan kehendak mereka terlebih pihak KUA tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, bisa saja orang tua memaksa anak mereka untuk menikah karena mereka merasa memiliki hak atas anak mereka.

Penulis juga mendapati bahwa selain pasal 17 KHI, terkait menanyakan persetujuan calon mempelai pada saat pelaksanaan akad nikah di hadapan dua saksi nikah juga diatur dalam buku Panduan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia yang diterbitkan oleh Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur serta Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatd Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Seperti yang diketahui dua buku pedoman tersebut merupakan petunjuk tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan akad nikah bagi Pegawai Pencatat Nikah agar dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan tertib administrasi juga pelayanan mereka pada masyarakat.

Dalam hal ini, maka jelas diketahui bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam pernikahan, sehingga Penghulu seharusnya tetap menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum pernikahan dilangsungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, alasan maupun faktor tersebut di atas seharusnya tidak membuat penghulu mengabaikan peraturan yang ada. Kompilasi Hukum Islam, Kementrian Agama dan Departemen Agama telah mengatur terkait menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai bentuk penegasan serta kehati-hatian agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan secara paksa.

Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah memang tidak membatalkan juga tidak menjadikan pernikahan tidak sah. Namun, baiknya Pegawai Pencatat Pernikahan menanyakan persetujuan calon mempelai guna menghindari halhal yang mengkaburkan tujuan menikah itu sendiri juga mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan. Penulis berpendapat bahwa penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah yang hadir saat pelaksanaan akad nikah harusnya mengimplementasikan peraturan tersebut untuk memastikan lebih dalam terkait apakah pernikahan tersebut didasarkan kerelaan mempelai, mengantisipasi adanya pernikahan yang dilakukan secara paksa, karena mengingat tingginya tingkat perjodohan yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal mengimplementasikan pasal 17 KHI dan tidak berjalan sesuai dengan peraturan dalam pedoman yang ada, meskipun pelaksanaan akad tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena pihak KUA tetap melaksanakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku juga tak menyalahi aturan agama. Akan tetapi, alangkah baiknya bila hal tersebut tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena hal tersebut merupakan aturan tertulis yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, Panduan Praktis Pelaksanaan A<mark>ka</mark>d <mark>Nikah dan</mark> Rum<mark>ah</mark> Tangga Bahagia dan Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatd Nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh negara sebagai acuan bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

- 1. Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir sama dengan KUA lain yang mana calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat menikah beserta ketentan lain didalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebelum akad nikah berlangsung Pegawai Pencatat Nikah tidak menanyakan persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua saksi nikah karena beberapa faktor yaitu; latar belakang keluarga di Kecamatan Semampir, meminimalisir waktu karena banyaknya peristiwa nikah yang terjadi, pihak KUA kurang memperhatikan peraturan dan tata cara pelaksanaan nikah dan telah ada lembar N3 yang mewakili bentuk persetujuan diantara kedua mempelai.
- 2. Pelaksanaan akad nikah tanpa menanyakan persetujuan calon mempelai yang terjadi di KUA Kecamatan Semampir tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, karena pihak KUA tetap memenuhi rukun dan syarat nikah serta telah ada lembar N3 (lembar persetujuan mempelai) sebagai bentuk pernyataan atas kerelaan kedua calon mempelai. Akan tetapi, bila dilihat dari tata cara pelaksanaan nikah, KUA Kecamatan Semampir tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal karena tidak menerapkan pasal 17

KHI yakni menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut:

- 1. Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Semampir hendaknya tetap menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah sebelum akad nikah dilangsungkan, mengingat tingginya tingkat perjodohan di Kecamatan Semampir sehingga hal tersebut dirasa dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak ada pernikahan yang dilangsungkan secara paksa.
- 2. Pihak KUA Kecamatan Semampir hendaknya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan yang melarang adanya pernikahan secara paksa dan dampak memaksa anak untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asqalānī (al), Ibnu Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azwar, Saifudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bachtiar, Wardi. Metodologi Penelitian Dakwah. Jakarta: Logos, 1997.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Tim Penerjemah Aqwam. Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014
- Depag RI. Al-Quran Terjemah Indonesia. Jakarta: Sari Agung, 2001.
- Dewi, Ririn Rindiana. "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Prespektif Hadis". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Dimasqi (al), Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Ghazaly, Abdurrahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ibrahim, Hosen. Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Irawan, Muhammad Ari. "Konsep wali mujbir dalam perkawinan menurut pandangan Syafi'i dan Hanafi". Skripsi--Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016Irnawati, Sry. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang tua di Kelurahan Bontaramba Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa". Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2015.

- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir. *Minhājul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam* terj. Musthofa Aini et al. Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masruhan. Metodologi Penelitian (Hukum). Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, Kemal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Khamsah* terj. Masykur A.B et al. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- ----. *Al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Khamsah* Terj. Afif Muhammad cet. 1. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman al-Dimasqi. *Raḥmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Nasiri. *Kapita Selekta Perk<mark>aw</mark>inan: Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyar, Kawin Friend, Kawin Casablanca.* Cilacap: Ihya Media, 2016
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*, cet. 1. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Jubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004
- Perwira, Muhammad Galang. "Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Persetujuan Calon mempelai wanita dalam Perkawinan". Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, *juz 9.* Jakarata: Pustaka Azzam, 2012.
- Rahma, Ade. "Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Prespektif Teori Gender)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.
- Ramlyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rasyid, M. Aenur. "Hak Ijbar wali dalam Pandangan Imam Syafi'i Prespektif Gender" Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid* terj. M.A Abdrrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: As-syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Us-Sunnah*, terj. F. Amira Zrein Matraji, vol 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, terj. Moh Thalib. Bandung: PT. Al Maarif, 1997.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subhan, Zaitun. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender,* cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 1986.
- Syafaat, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syaltut, Mahmud dan Ali al-Sayis. *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqih*, terj. Ismuha. Jakarata: Bulan Bintang, 1993.
- -----. *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqih*, cet. 1, terj. Abdullah Zakiy. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Penyusun, Kamus Umum, cet. 1. Bandung: Angkasa, 1996.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Kitbah dan Nikah*, cet. 1. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'* terj. Ahmad Zainal Dachlan. Depok: Fathan Media, 2017
- ----. *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'*. terj. M Abdul Goffar, cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Zuhairi, Dardiri. Rahasia Perempuan Madura. Surabaya: al-Afkar Press, 2013.

- Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- -----. *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawatimur, 2012.
- ----. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press, 2003.

